

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk)**

Ratna Dewi

e-mail : ratnadewi.prihadi@gmail.com

Ismi Hijriani

e-mail : ismihijriani444@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, survei dan wawancara. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum dan Kepala Seksi Pemerintahan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*), yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan *software* SPSS versi 20. Selanjutnya berdasarkan analisis verifikatif bahwa secara simultan maupun secara parsial Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci : Kompetensi Aparat Desa, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safira Mukaromah *et al* (2023:64), pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Secara keseluruhan sumber pendapatan desa tersebut digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fenomena yang sering terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah adanya penyalahgunaan dana karena penggunaannya tidak sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, seperti untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan laporan dari Media Suara Mabas (2024) intelijen kejaksaan di Kabupaten Bandung menemukan bahwa Kepala Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, telah menyalahgunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 884 juta pada tahun 2022. Di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kepala Desa setempat juga dilaporkan menyelewengkan dana sebesar Rp 500 juta pada tahun 2021. Selain itu, Tribun Jabar News (2021) melaporkan melalui wartawan Mega Nugraha bahwa Kepala Desa Warnasari, Pangalengan, diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 500 juta untuk proyek infrastruktur. Namun, pelaksanaan proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan desa, pemerintah perlu memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi untuk pelaporan keuangan. Menurut Anak Agung Gede (2023:4), Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola informasi keuangan melalui perangkat lunak, perangkat keras, database, dan prosedur. Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam pencatatan transaksi, pengelolaan aset, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam observasi awal dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Bojongmangu pada 28 Februari 2024, menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes masih kurang optimal karena sebagian besar prosesnya masih dilakukan secara manual. penggunaan aplikasi Siskeudes belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan desa secara menyeluruh, yang seharusnya mengoptimalkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali serta penyesuaian dalam strategi penerapan aplikasi Siskeudes agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam mendukung tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.

Karena aplikasi Siskeudes wajib diterapkan secara *online* oleh aparatur pemerintahan desa, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Penelitian Ni Komang Suryaningsih *et al* (2020:42) menunjukkan bahwa peran sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan staf operator desa sangat penting dalam bekerja sama dan berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Kolaborasi yang baik antara sekretaris, kaur keuangan, dan staf operator desa akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akurat, serta meningkatkan efektivitas dalam pelaporan akuntabilitas. Dengan demikian, penggunaan Siskeudes tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan desa, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas kinerjanya dalam menjalankan tugas sesuai wewenang yang diberikan, termasuk dalam pengelolaan sumber dana yang diterima. Menurut penelitian Nafidah *et al.* (2015:214)

akuntabilitas hanya dapat berkembang dalam lingkungan yang transparan, demokratis, dan memungkinkan kebebasan berpendapat. Karena itu, pemerintah perlu memahami bahwa pelaksanaan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat selalu terkait dengan kepentingan publik. Warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah (*right to know*).

Berdasarkan fenomena dan teori diatas penulis berasumsi bahwa Kompetensi Aparat Desa yang baik akan didukung oleh Sistem Informasi Akuntansi serta Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.
2. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pengertian Kompetensi Aparat Desa

Menurut Wibowo (2016:324) kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan atau melakukan suatu tugas yang didasari oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kompetensi mencerminkan keterampilan atau pengetahuan yang diiringi dengan profesionalisme di bidang tertentu dan menjadikannya unggul di bidang tersebut.

Menurut Badan Kepegawaian Negera Nomor 1 Tahun 2013, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

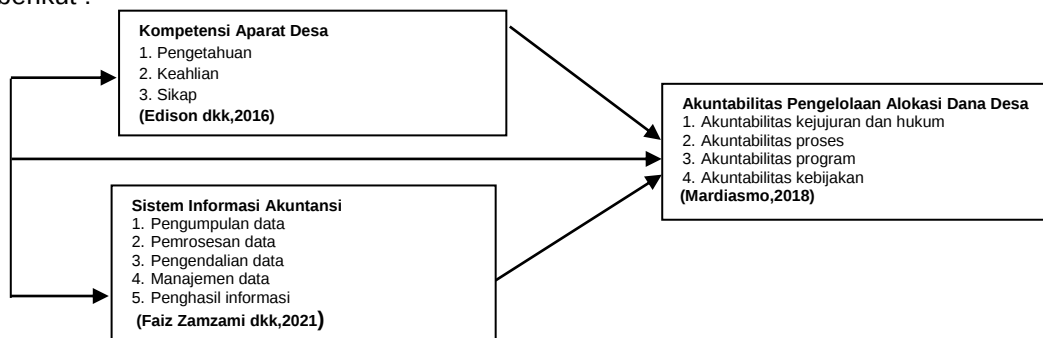
Menurut Lim dalam buku Faiz Zamzami (2021:3) Sistem Informasi Akuntansi adalah alat yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi suatu perusahaan. Sistem ini memadukan fungsi akuntansi dengan teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data keuangan secara efisien. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan selalu *up to date* dan dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

2.1.3 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018:14) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangkan pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif secara parsial Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.
2. Terdapat pengaruh positif secara parsial Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.
3. Terdapat pengaruh secara simultan Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

II. METODE PENELITIAN

3.2 Metode Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparat Desa (X_1)
2. Sistem Informasi Akuntansi (X_2)
3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka).

3.2.1. Populasi dan Sempel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:16) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk yang berjumlah 94 perangkat desa dari 6 desa, masing-masing perangkat desa berjumlah 15 sampai 16 orang.

3.2.1.2 Sempel

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non-probability* sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive* sampling. Menurut Sugiyono (2017:138), *purposive* sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama, Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator, sementara Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas merencanakan penggunaan dana desa serta menyusun laporan keuangannya:

Tabel 3.1
Sampel Penelitian (Responden)

No	Nama Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kaur	Kasi	Jumlah
1	Desa Sukasari	1	1	3	1	6
2	Desa Langonsari	1	1	3	1	6
3	Desa Bojongkunci	1	1	3	1	6
4	Desa Rancatungku	1	1	3	1	6
5	Desa Rancamulya	1	1	3	1	6
6	Desa Bojongmanggu	1	1	3	1	6
Total Sampel						36

Sumber : Hasil Observasi

3.2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis Koefisien Korelasi

Rumus yang digunakan adalah rumus product moment digunakan sekaligus untuk mengetahui persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Sumber: Sugiyono (2017:228)

2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Sugiyono (2017:80), analisis jalur adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel *intervening*. Penelitian yang menggunakan analisis jalur, diperlukan diagram jalur (*path diagram*) yang akan menggambarkan struktur hubungan antara variabel penyebab dengan akibat.

3. Koefisien Determinasi

Rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = R^2.100\%$$

Sumber: Ghazali (2016:130)

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) mendefinisikan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikansinya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiyono sebagai berikut:

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{1-r_p^2}$$

Sumber: Sugiyono (2017:237)

Keterangan:

r_p : korelasi Parsial

n : banyaknya sampel

t : tingkat signifikan (t_{hitung})

Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $t_{hitung} > -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

b. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui apakah variabel independen keseluruhan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikansi tertentu. F_{hitung} dicari menggunakan rumus yang dikemukakan Sugiyono sebagai berikut:

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-F^2)/(n-k-1)}$$

Sumber : Sugiyono (2017: 235)

Keterangan:

R^2 = koefisien korelasi ganda

K = jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

dk = (n-k-1) derajat kebebasan

Setelah menghitung nilai F_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koefisien Korelasi

Perhitungan koefisien korelasi menggunakan analisis korelasi *Pearson product moment*, dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen (X_1 dan X_2) yang diteliti. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS versi 20.

Tabel 4.1
Koefisien Korelasi antar Variabel Independen (X)

Correlations		
	Kompetensi Aparat Desa	Sistem Informasi Akuntansi

Kompetensi Aparat Desa	Pearson Correlation	1	.770**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	36	36
Sistem Informasi Akuntansi	Pearson Correlation	.770**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	36	36

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

Berdasarkan hasil *output* SPSS diatas, bahwa hubungan antara variabel Kompetensi Aparat Desa (X_1) dengan Sistem Informasi Akuntansi (X_2) didapat nilai 0,770 sehingga apabila dikonsultasikan dengan variabel interpretasi nilai r (korelasi), berada pada daerah 0,60-0,799 artinya kedua variabel bebas mempunyai tingkat hubungan yang kuat dan positif. Dapat diasumsikan bahwa setiap Kompetensi Aparat Desa meningkat maka akan semakin baik Sistem Informasi Akuntansi, demikian juga sebaliknya.

4.1.2 Koefisien Jalur

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS versi 20, diperoleh besaran koefisien jalur seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Nilai Koefisien jalur
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2877.343	4070.552		-.707	.485
	Kompetensi Aparat Desa	.418	.167	.344	2.497	.018
	Sistem Informasi Akuntansi	.660	.160	.569	4.125	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.863 ^a	.744	.729	3951.251	2.667

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Aparat Desa

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

Perhitungan koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber: Ghazali (2016:130)

Dengan nilai R sebesar 0,863 maka nilai koefisien determinasinya adalah sebagai berikut:

$$KD : 0,863^2 \times 100\%$$

$$KD : 0,744 \times 100\%$$

$$KD : 74,4\%$$

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Kompetensi Aparat Desa (X_1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 74,4% sisanya 25,6% atau 0,256 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.1.4 Pengaruh faktor lain/epsilon (ϵ) terhadap variabel terikat (Y)

Pengaruh faktor lain/epsilon (ϵ) terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus:

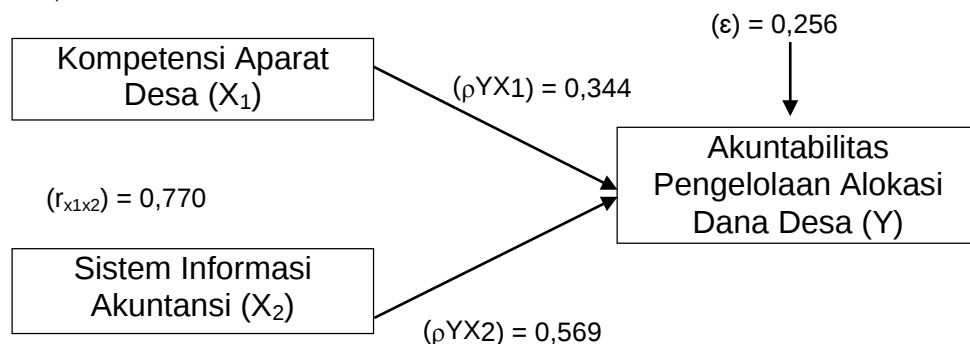
$$\epsilon = 1 - R^2$$

Maka:

$$\epsilon = 1 - 0,863^2$$

$$= 1 - 0,744$$

$$= 0,256$$



Gambar 4.1

Diagram Jalur Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = 0,344X_1 + 0,569X_2 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X_1 = Kompetensi Aparat Desa

X_2 = Sistem Informasi Akuntansi

Tabel 4.4
Perngaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Bebas Terhadap
Variabel Terikat

Variabel	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa			
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		
		X ₁	X ₂	Total
Kompetensi Aparat Desa	11,8%		15,1%	26,9%
Sistem Informasi Akuntansi	32,4%	15,1%		47,5%
Total Pengaruh (R ²)				74,4%
Epsilon/faktor lain (ε)				25,6%

Sumber: Hasil Perhitungan MS Ecel 2021

Berdasarkan tabel 4.4 pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat di atas, dapat dilihat bahwa:

- 1) Variabel Kompetensi Aparat Desa (X₁) mempunyai pengaruh langsung sebesar 11,8%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Sistem Informasi Akuntansi (X₂) sebesar 15,1 sehingga total pengaruhnya adalah sebesar 26,9%.
- 2) Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X₂) mempunyai pengaruh langsung sebesar 32,4%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Kompetensi Aparat Desa (X₁) sebesar 15,1 sehingga total pengaruhnya sebesar 47,5%
- 3) Hasil perhitungan koefisien determinasi (R²) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu Kompetensi Aparat Desa (X₁) dan Sistem Informasi Akuntansi (X₂) dalam pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah sebesar 74,4%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ditunjukan oleh nilai epsilon/faktor lain (ε) = 25,6%. Variabel lain yang dimaksud adalah seperti faktor partisipasi masyarakat, Dana Desa, penerimaan pajak dan lain sebagainya.

4.1.5 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji-t Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2877.343	4070.552		-.707	.485
1 Kompetensi Aparat Desa	.418	.167	.344	2.497	.018
Sistem Informasi Akuntansi	.660	.160	.569	4.125	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

a. Uji-t (parsial) Kompetensi Aparat Desa (X_1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Pada tabel 4.5 diatas, nilai t_{hitung} untuk Kompetensi Aparat Desa (X_1) adalah 2,497 pada t_{tabel} dengan dk 33 ($n-3 = 36-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,035 (lihat t-tabel pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,497 > 2,035$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji-t (parsial) Sistem Informasi Akuntansi (X_2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Pada tabel 4.23 diatas, nilai t_{hitung} untuk Sistem Informasi Akuntansi (X_2) adalah 4,125 pada t_{tabel} dengan dk 33 ($n-3 = 36-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 2,035.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Uji-F
Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1498518841.115	2	749259420.557	47.991	.000 ^b
Residual	515208803.191	33	15612387.975		
Total	2013727644.306	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

Dari hasil perhitungan serta tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa F_{hitung} adalah 47,584 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh F derajat bebas yaitu residual 33 dengan regresi 2 dengan taraf signifikan 0.05 diperoleh F_{tabel} sebesar 3,285. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa secara Parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Kompetensi Aparat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparat Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizal (2023:65) mengenai Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi,

Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel. Sebaliknya, semakin rendah kompetensi aparat desa dalam mengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.

2. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi secara Parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian Keputusan yang diambil dengan Tingkat signifikansi bahwa Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Anna Marina *et al* (2017:32) Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah jaringan yang mencakup semua prosedur, formulir, catatan, dan alat yang digunakan untuk memproses data keuangan menjadi laporan yang berguna bagi manajemen dalam mengendalikan operasional bisnis serta mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi ini adalah bagian dari sub sistem yang terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis yang saling berhubungan. Informasi akuntansi ini tidak hanya digunakan sebagai alat manajemen untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan membuat keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh manajemen kepada tingkat manajemen dan karyawan di bawahnya. Proses pertanggungjawaban ini akan berjalan dengan baik melalui adanya sistem yang memungkinkan setiap karyawan mencatat dan mendokumentasikan semua peristiwa dan transaksi yang terjadi secara sistematis, teratur, standar, dan mudah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siska Wahyuni *et al* (2018:108) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, semakin tinggi Sistem Informasi Akuntansi maka akan baik pula Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, demikian pula sebaliknya.

3. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi

Akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:28) akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan salah satu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang di emban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabel berarti pertanggungjawaban pemerintahan desa dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur tidak melakukan penyelewengan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adriansah Polutu *et al* (2022:72) mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Kompetensi Aparat Desa, Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

V. SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk. Dengan demikian Kompetensi Aparat Desa memberikan kontribusi yang positif yang dapat menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan pameungpeuk, artinya semakin baik Kompetensi Aparat Desa maka akan semakin baik Akuntabilitas engelolaan Alokasi Dana Desa, demikian pula sebaliknya.
2. Sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk. Dengan demikian Sistem Informasi Akuntansi memberikan kontribusi yang positif dan dapat menentukan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk, artinya semakin baik Sistem Informasi Akuntansi maka akan semakin baik pula Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, demikian pula sebaliknya.
3. Secara simultan variabel bebas Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk.

1.2 Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

A. Bagi Perusahaan

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat direkomendasi saran-saran bagi pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran Kompetensi Aparat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk, hasil dari penyebaran kusioner mengenai aparat desa memiliki keahlian dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu memiliki skor rendah dibanding unsur-

unsur lainnya pada variabel yang sama. Oleh karena itu, Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan.

2. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk, mengenai Sistem Informasi Akuntansi mengurangi risiko kesalahan dalam pemrosesan data mendapatkan skor yang masih rendah. Risiko kesalahan bukan hanya disebabkan oleh sistemnya saja tetapi bisa jadi karena Sumber Daya Manusianya juga yang memang belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur yang ada. Usulan perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan pembaruan dan perbaikan sistem yang diperlukan, pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan pembaharuan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung Sistem Informasi Akuntansi menjadi lebih optimal.
3. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pameungpeuk, hasil dari proses pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik mendapatkan skor yang masih rendah. Meskipun pada keadaan yang sebenarnya transparansi telah dilakukan dengan cukup baik melalui pemasangan baliho di depan desa. Tetapi untuk meningkatkan lagi akuntabilitasnya perlu dilakukan pertemuan terbuka atau musyawarah desa secara rutin untuk membahas alokasi dan penggunaan dana desa. Ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan langsung dan merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Kompetensi Aparat Desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, saran penulis yaitu kepada pihak pemerintahan desa untuk lebih meningkatkan kompetensi aparturnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang memadai terkait pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pemahaman tentang peraturan keuangan, penggunaan sistem informasi akuntansi, teknik pelaporan yang akurat, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya kompetensi aparat desa, diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa akan semakin baik, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, saran penulis yaitu pihak pemerintahan desa terus memperkuat dan mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara memperbarui perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, serta memastikan bahwa semua aparat desa terlatih dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Akuntansi dengan baik. Selain itu, pemeliharaan sistem yang berkala dan peningkatan integrasi data antar departemen juga diperlukan untuk memastikan keandalan dan keakuratan informasi yang dihasilkan. Dengan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan melalui Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas diharapkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa akan semakin meningkat.
6. Secara simultan Kompetensi Aparat Desa dan Sistem Informasi Akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, peningkatan Kompetensi Aparat Desa bisa melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan agar aparat desa dapat lebih memahami peran mereka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta menjadi lebih terampil dalam Menyusun

laporan keuangan yang akurat dan transparan. Sistem Informasi Akuntansi juga harus dioptimalkan dengan memastikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan, terintegrasi dengan baik, dan dapat digunakan secara efektif oleh seluruh aparat desa.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menggunakan variabel Kompetensi Aparat Desa, Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta mengembangkan variabel independen baru seperti Dana Desa, Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Memperbesar jumlah sampel dan melakukan metode survei serta wawancara secara mendalam untuk meningkatkan keseriusan dan kepedulian responden dalam menjawab pernyataan.
3. Mengembangkan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

Ariana, Anak Agung Gede Bagus. 2023. Sistem Informasi Akuntansi Pengantar dan Penerapan SIA Berbagai Sektor. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, Ihda Arifin Faiz. 2021. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Marina Anna, Sentot Imam Wahjono, Ma'ruf Syaban, Agusdiwana Suarni. 2017. Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktika. Surabaya: UMSurabaya Publishing.

Wibowo. 2016. Manajemen Kerja . Jakarta: Rajawali Pres.

Sugiyono. 2017. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Ni Komang Suryaningsih, Made Pradana Adiputra. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna dan *Usability* Sistem Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa. Volume 11, Nomor 1. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/2559>

Nafidah, Lina Nasihatun, dan Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volume 3, Nomor 1. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>

Polutu Adriansah, Mattoasi, Usman. 2022. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jambura Accounting Review. Volume 3, Nomor 2, hlm 66-78. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>

Safira Mukaromah, Nashva Azzahra Maharani Safitri, Marcelleno, Lukas Imanuel. 2023. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. Jurnal Serambi Hukum. Volume 16, Nomor 2, hlm 62-74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>

Wahyuni, S, Indrawati, N., & Al Azhar, A. 2018. Pengaruh sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal ekonomi. Volume 26, Nomor 3, hlm 98-110. <https://ejournal.unri.ac.id/jurnal-ekonomi/>

Nugraha, M. 2021. Korupsi Dana Desa, Dua Kades di Kabupaten Bandung Ditahan, Uang Korupsi untuk Biaya Pilkades. Bandung: Tribun Jabar. <https://jabar.tribunnews.com/2021/01/21/korupsidana-desa-dua-kades-di-kabupaten-bandung-ditahan-uang-korupsi-untuk-biaya-pilkades>. (Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024, Pukul 21:00).

Kades Bumiwangi, Kab. Bandung Menjadi Tersangka Kasus Korupsi DD dan APBD. Bandung: Media Suara MABES. <https://www.suaramabes.com/kades-bumiwangi-kab-bandung-menjadi-tersangka-kasus-korupsi-dd-dan-apbd-tahun-2022/>.(Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024, Pukul 20:51).

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011<https://peraturan.bpk.go.id/Details/141584/perka-bkn-no-1-tahun-2013> (Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 21:48).

Undang-undang Nomor 6 tentang Desa Pasal 1 tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017.